Reinventing Nilai-Nilai Islam, Budaya, dan Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter

Mukhibat

STAIN Ponorogo
e-mail: Mukhibat@yahoo.co.id

DOI: 10.14421/jpi.2012.12.247-265

Diterima: 10 Oktober 2012 | Direvisi: 22 November 2012 | Disetujui: 7 Desember 2012

Abstract

Character education has become an important part of the national education system for character education has been positioned to be one step for curing social illness. However, it is still asked about what the content and process that will be done by the leaders of educational character of this nation. The moral values which are to be developed in the educational character of the nation of Indonesia consist of religious values, cultural values, and the values of Pancasila. Those are character educations which can be regarded as an authentic or specific character education in Indonesia.

Keywords: Values, Morals, Character Education

Abstrak

Pendidikan karakter telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena pendidikan karakter telah diposisikan menjadi salah satu langkah untuk menyembuhkan penyakit sosial. Namun demikian, masih perlu dipertanyakan apa sesunggunya isi dan proses, yang hendak dijalankan oleh para pemimpin pendidikan karakter bangsa ini. Nilai ideal yang dikembangkan dalam pendidikan karakter Indonesia terdiri dari nilai agama, budaya dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan karakter yang seperti itulah yang bisa dikatakan sebagai susuatu yang otentik atau khas pendidikan karakter Indonesia.

Kata Kunci: Nilai, Moral, Pendidikan Karakter

Pendahuluan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengawali kerjanya sebagai kepala pemerintahan pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di Republik ini dengan menyatakan "bahwa kita harus menjaga jati diri kita, ke-Indonesiaan kita. Hal yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain di dunia adalah budaya kita, way of life kita dan ke-Indonesiaan kita. Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah goyah. Keindonesiaan kita tercermin dalam sikap pluralisme atau kebhinekaan, kekeluargaan, kesatuan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan kemanusiaan. Hal-hal inilah yang harus kita jaga, kita pupuk, kita suburkan di hati sanubari kita dan di hati anak-anak kita".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Presiden ingin mengangkat persoalan karakter bangsa dalam dinamika pembangunan nasional. Itulah sebabnya pada tanggal 14 Januari 2010, dalam sarasehan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional telah dideklarasikan "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" sebagai gerakan nasional¹. Mengapa Presiden dan Kementerian Pendidikan Nasional mengangkat persoalan karakter bangsa? Itu bukan sebuah basa-basi, tetapi terkait dengan realitas kehidupan masyarakat dan masalah-masalah sosio-kebangsaan di Indonesia saat ini. Maraknya kenakalan dan perkelahian antar pelajar, pergaulan bebas², peningkatan jumlah penggunan narkoba, yaitu sebesar 22,7%, dari 1,1 juta ditahun 2006 menjadi 1,35 juta tahun 2008. Dari 3,6 juta penyalahgunaan narkoba 41 % mencoba di usia 16 sd 18 tahun³. Konflik horisontal, lalu lintas di jalanan tidak tertib, lunturnya etika dan budi pekerti, korupsi, dan semua itu sangat cukup sebagai argumen atas keprihatinan bersama tentang merosotnya budi pekerti dan lemahnya kemandirian serta jati diri bangsa.

Krisis akhlak dan moral tersebut mengingatkan kepada sebuah kritik sosial yang sangat tajam yang dilontarkan seorang pujangga dari Kraton Surakarta, R.Ng. Ranggawarsita terhadap realitas sosial, sekitar, 140-an tahun yang lalu melalui "Serat Kalatida". Dalam serat ini antara lain dijelaskan adanya istilah "zaman edan". Bahkan menariknya, istilah "zaman edan" ini semakin populer di kalangan masyarakat pada era modern sekarang ini⁴. Istilah tersebut dipandang sangat cocok dengan perkembangan sekarang ini yang ditandai dengan kemerosotan akhlak,

Muhammad Nuh, "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" dalam Kompas edisi Sabtu, 20 Februari 2010.

Situs resmi BKKBN tahun 2008 melaporkan, sebanyak 63% remaja pada usia SMP dan SMA pernah berhubungan seks di luar nikah dan 21 persen di antaranya melakukan aborsi.

Laporan Badan Nasional Penanggulangan Narkotika tahun 2008

Baca Simuh, Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999), hlm. 189.

aspek moralitas, dan etika kesantunan, tindak kekerasan, serta lemahnya jati diri bangsa.

Berdasarkan atas kondisi moral bangsa yang demikian, munculah wacana akademik mengenai pendidikan karakter. Sekarang ini telah tumbuh kesadaran betapa mendesaknya agenda untuk melakukan terobosan guna membentuk dan membina karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Sejumlah ahli pendidikan mencoba untuk merumuskan konsep-konsep tentang pendidikan karakter, dan sebagiannya lagi bahkan sudah melangkah jauh dengan mempraktekannya.

Namun demikian, masih perlu lebih jauh, apa sesunggunya isi dan proses yang hendak dijalankan oleh pendidikan karakter bangsa ini. Bagaimana karakter sebagai sebuah kebajikan (virtue) dipahami, nilai-nilai moral manakah yang ingin diajarkan dalam pendidikan karakter bangsa Indonesia, sehingga dianggap sebagai nilai moral yang otentik bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia sejak dulu mempunyai nilai agama, nilai budaya, dan nilai Pancasila.

Dari sekian banyak wacana pendidikan karakter, menurut hemat penulis, konsep pendidikan karakter sekarang belum sepenuhnya mampu memberikan jawaban atas pertanyaan di atas. Boleh jadi, bagi para pelaku atau praktisi pendidikan karakter, pertanyaan-pertanyaan di atas tidak penting untuk dicari jawabannya karena tidak memberi solusi praktis terhadap problem pendidikan. Tulisan ini mencoba untuk ikut urun rembug dalam memberikan jawaban dari pertanyaanpertanyaan di atas dengan melakukan reinventing atau penggalian kembali nilainilai manakah yang sebenarnya dijadikan sumber dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa Indonesia, sehingga akan ditemukan nilai pendidikan karakter yang khas bangsa Indonesia.

Pendidikan Karakter

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". ⁵ Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 7

yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional harus menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Istilah pendidikan karakter berasal dari dua kata "pendidikan" dan "karakter". Dari sudut pandang filsafat, pendidikan akan terkait dengan filsafat pendidikan, sedangkan karakter menjadi bagian dari filsafat moral atau etika. Oleh karena itu sebenarnya konsep pendidikan karakter dapat ditinjau dari filsafat pendidikan dan filsafat moral yang melandasinya.

Secara konseptual, istilah pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan religius, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak mulia, pendidikan moral atau pendidikan nilai⁶. Karakter secara etimologis menurut Mounier berasal dari bahasa Yunani "kasairo" berarti "cetak biru", format dasar", "sidik" seperti sidik jari. Menurutnya dalam pengertian karakter mengandung dua interpretasi, pertama karakter adalah *given* atau sesuatu yang sudah dari sananya, *kedua* suatu yang dibentuk melalui proses yang dikehendaki (willed).7 Interpretasi kedua menyiratkan bahwa karakter sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.

Istilah karakter juga merujuk pada ciri khas, perilaku khas seseorang atau kelompok, kekuatan moral, atau reputasi8. Karakter juga dipahami sebagai seperangkat ciri perilaku yang melekat pada diri seseorang yang menggambarkan tentang keberadaan dirinya kepada orang lain. Penggambaran itu tercermin dalam prilaku ketika melaksanakan berbagai aktivitas apakah secara efektif melaksanakan dengan jujur atau sebaliknya, apakah dapat mematuhi hukum yang berlaku atau tidak⁹.

Adapun pendidikan karakter bagi Doni Koesoema adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri¹⁰. Bagi Doni pendidikan karakter harus bersifat membebaskan. Alasannya, hanya dalam kebebasannya individu "dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat bertanggung jawab atas

Samsuri, "Mengapa Perlu Pendidikan Karakter". Makalah, disajikan pada workshop tentang Pendidikan Karakter oleh FISE UNY. Yogyakarta tahun 2009. Dan Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5

Emmanuel Mounier, The Charakter of Man, (New York: Harper dan Brathers, 1956), hlm. 28.

Thomas Lickona, Education for Character Education: how Our School Can Teach Respect and Responsibility, (New York: Bantam), 1991), hlm. 5.

Ibid., hlm. 6

¹⁰ A. Doni Koesoema, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak, di Zaman Global (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 194.

pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka"11.

Pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada warga masyarakat agar menjadi warga bangsa yang percaya diri, tahan uji dan bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab serta survive dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter juga senantiasa mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi para peserta didik¹². Objek pendidikan karakter adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut didapat melalui proses internalisasi dari apa yang diketahui, yang membutuhkan waktu sehingga terbentuklah pekerti yang baik sesuai dengan nilai yang ditanamkan¹³.

Pengembangan pendidikan karakter, harus dilakukan secara konprehensif oleh pendidik dengan bekerja sama dengan keluarga atau orang tua/wali peserta didik. Bahkan, menurut Cletus R. Bulach¹⁴ pendidik dan orang tua perlu membuat kesepakatan tentang nilai-nilai utama apa yang perlu dibelajarkan misalnya: respect for self, others, and property; honesty; self-control/discipline.

Thomas Lickona¹⁵ menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik antara lain kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai atau menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan. Pendidikan karakter bukan sekadar memiliki dimensi integratif, dalam arti mengukuhkan moral intelektual peserta didik atas dasar nilai-nilai kebaikan, sehingga menjadi pribadi yang mantap dan tahan uji, pribadipribadi yang cendekia, mandiri dan bernurani, tetapi juga bersifat kuratif secara personal maupun sosial.

Terkait dengan ini Wayan Lasmawan¹⁶ menjelaskan adanya tiga kompetensi yang wajib dikembangkan dalam pendidikan karakter, yakni kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi intelektual.

Ibid.

Kirsten Lewis, "Character Education Manifesto", News, (Boston University, 1996), p. 8

¹³ Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 38.

¹⁴ Cletus R. Bulach, "Implementing a Character Education Curriculum and Assessing Its Impact on Student Behavior", ProQuest Education Journal, (Dec.2002), 80, http://- www.jstor.org/ pss/30189797, [22 Juni 2011].

Thomas Lickona, "Talks About Character Education", wawancara oleh Early Chilhood Today, Pro Quest Education Journal, (April, 2000), 48, http://webcache.google usercontent. com., diunduh, 20 April 2010.

Wayan Lasmawan, "Merekonstruksi Mata Pelajaran Berdasarkan Paradigma Teknohumanistik", Makalah, pada Seminar Pendidikan yang di FIS Undiksa, 30 Oktober, 2009.

- Kompetensi personal merupakan kemampuan dasar yang berkaitan dengan 1. pembentukan dan pengembangan kepribadian diri peserta didik sebagai makhluk individu yang merupakan hak dan tanggung jawab personalnya. Orientasi dasar pembentukan dan pengembangan kompetensi personal ini ditekankan pada upaya pengenalan diri dan pembangunan kesadaran diri peserta didik sebagai pribadi/individu dengan segala potensi, keunikan dan keutuhan pribadinya yang dinamis. Sejumlah kompetensi yang personal ke-Islaman-an yang perlu dikembangkan misalnya, pembentukan konsep dan pengertian diri, sikap objektif terhadap diri sendiri, aktualisasi diri, kreativitas diri, kemandirian itu sendiri, termasuk bagaimana menumbuhkembangkan budi pekerti luhur, disiplin dan kerja keras serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, sehingga perlu menumbuhkembangkan dan memantapkan keimanan dan ketaqwaannya.
- Kompetensi sosial adalah kemampuan dasar yang berkaitan dengan 2. pengembangan kesadaran sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Sejumlah kompetensi dasar yang dikembangkan adalah kesadaran dirinya sebagai anggota masyarakat sehingga perlu saling menghormati dan menghargai; pemahaman dan kesadaran atas kesantunan hidup bermasyarakat dan berbangsa; kemampuan berkomunikasi dan kerja sama antara sesama; sikap pro-sosial atau altruisme; kemampuan dan kepedulian sosial termasuk lingkungan; memperkokoh semangat kebangsaan, pemahaman tentang perbedaan dan kesederajatan dalam.
- 3. Kompetensi intelektual, merupakan kemampuan berpikir yang didasarkan pada adanya kesadaran atau keyakinan atas sesuatu yang baik yang bersifat fisik, sosial, psikologis, yang memiliki makna bagi dirinya maupun orang lain. Kemampuan dasar intelektual ini berkaitan dengan pengembangan jati diri para peserta didik sebagai mahkluk berpikir yang daya pikirnya untuk menerima dan memproses serta membangun pengetahuan, nilai dan sikap, serta tindakannya baik dalam kehidupan personal maupun sosialnya. Kemampuan mengidentifikasi masalah sosial, merumuskan masalah sosial dan memecahkan masalah itu sebagai ciri penting dalam kemampuan berpikir.

Ketiga kompetensi dengan berbagai nilai yang terkandung di dalamnya itulah yang harus dibangun melalui pembelajaran, sehingga melahirkan pelakupelaku sosial yang mumpuni. Para pelaku sosial itu harus dapat membangun sikap dan perilaku dengan berbagai dimensinya, memahami hak dan kewajibannya, kemudian memiliki kepekaan untuk memahami, menyikapi dan ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan yang ada¹⁷.

Beberapa masalah sosio-kebangsaan sebagaimana sudah disinggung di muka seperti: berbagai

Kebenaran Nilai Moral: Antara Relativism Moral dan Absolute Moral

Pemaknaan pendidikan karakter seperti di atas, telah memposisikan pendidikan karakter menjadi salah satu langkah untuk menyembuhkan penyakit sosial¹⁸. Namun demikian hal penting yang dipertanyaan adalah nilai-nilai moral manakah yang ingin dikembangkan dalam pendidikan karakter?. Sehingga akan diketahui secara pasti karakter seperti apa yang ingin dibentuk di Indonesia ini. Sebagaimana dipahami bahwa bangsa Indonesia mempunyai beberapa sumber nilai, seperti nilai agama, budaya, dan nilai Pancasila. Pertanyaan demikian membawa perdebatan pada wilayah etika normatif yakni prinsip dan norma moral manakah yang dapat dijadikan acuan bagi penilaian dan putusan moral.

Terhadap masalah ini ada dua kelompok pendapat yang berbeda. Satu kelompok berpendapat bahwa kebenaran moral itu relatif (moral relativism). Moral baik dan buruk tergantung pada bagaimana individu mendefinisikan. Berdasar teori ini, prinsip moral baik yang berasal dari agama, budaya, dan Pancasila bukan suatu yang innate, alami atau mengandung keabadian tetapi sesuatu yang dikonstruksikan oleh lingkungan sosial. Bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial, maka nilai-nilai yang dianut juga beragam sehingga tidak berlaku adanya kebenaran nilai yang berkaku absolut. Nilai dianggap benar tergantung dari siapa yang mendefinisikan "whose is values" (moral menurut siapa)¹⁹.

Kelompok lain berpendapat bahwa kebenaran moral bersifat absolut (Absolute Moral). Kelompok ini sangat percaya bahwa ada standar moral yang berlaku umum yakni standar yang berlaku absolute, universal, di mana agama dan budaya pasti mengakuinya. Seperti care (kasih sayang), respect (saling menghormati), responsible (bertanggung jawab), integrity (integritas), harmony (keseimbangan) adalah nilai moral universal yang absolute kebenarannya. Kelompok ini juga menganggap moral universal juga bersumber dari agama-agama yang ada yaitu prinsip golden $rule^{20}$.

Dalam sejarah pendidikan karakter di Amerika Serikat, ditengarai bahwa paham moral relativism telah menjadi penyebab utama terjadinya dekadensi moral pada remaja Amerika di era tahun 1980-1990-an. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatknya perilaku seks bebas, pergaulan alkohol, obat terlarang dan

bentuk anarkhisme dan tindak kekerasan, perilaku amoral dan lunturnya budi pekerti, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakjujuran, budaya nerabas dan tidak disiplin, semau gue dan rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, sampai pada merosotnya rasa ke-Indonesiaan.

Doni Koesoema, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak Bangsa, di Zaman Global (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 116.

Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa, (Jakarta: IHF dan BP Migas, 2004), hlm. 98.

Ibid., hlm. 99.

pelecehan agama. Standar moral warga Amerika menjadi luntur dikarenakan anak tidak mengetahuhi mana moral yang baik dan moral yang buruk.

Kegagalan pendidikan moral pada masa itu disebut oleh Thomas Lickona dalam Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility sebagai "The declined of character education". Mengapa hal itu bisa terjadi? Menurutnya, disebabkan oleh munculnya pandangan-pandangan filosofis sebagai berikut:

- 1. Darwinisme yang menyatakan bahwa evolusi terjadi pada semua hal termasuk nilai. Nilai dianggapnya sebagai benda (thing). Nilai tidaklah tetap, selalu berkembang dan fluktuatif.
- 2. Personalisme yang menyatakan setiap orang seharusnya bebas untuk memilih nilai-nilai. Orang lain tidak berhak menentukan apa yang menjadi nilai seseorang.
- 3. Pluralisme yang berpandangan bahwa nilai-nilai itu beragam sesuai dengan keragaman kelompok-kelompok di masyarakat. Ini memunculkan pertanyaan mengenai pendidikan karakter, yakni nilai-nilai siapakah yang seharusnya diajarkan (*Whose values should we teach*?).
- 4. Paham sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dan publik. Pendidikan karakter dicurigai bahkan ditakutkan akan mengajarkan moralitas agama ke dalam ranah publik (sekolah).

Mengantisipasi akan gejala ini maka mulai tahun 1990-an, gerakan pendidikan karakter mulai dikembangkan kembali namun dalam gagasan yang baru. Thomas Lickona menyebutnya sebagai "The Return of Character Education"²¹. Masyarakat Amerika dan orang dewasa mengakui bahwa anak muda membutuhkan pengarahan moral, bukan lagi diberi kebebasan memilih moral. Orang tua dan pendidik memiliki tanggung jawab untuk menentukan nilai-nilai kebaikan (good values) dan membantu membentuk karakter mereka berdasarkan nilai-nilai kebaikan tersebut.

Apa yang telah terjadi di Amerika Serikat, hendaknya menjadikan renungan yang mendalam bagi bangsa Indonesia, walaupun Indonesia dan Amerika Serikat memiliki sejarah yang berbeda. Karakter yang baik tidak hanya kemampuan memberi penalaran moral, mampu mengajukan pertimbangan moral serta memberi alasan pembenaran yang kesemua itu masih terbatas pada dimensi pengetahuan moral. Pendidikan karakter merupakan petunjuk (directive) dari pada kebebasan memilih (non directive), pendidik, orang tua berhak menentukan nilai-nilai apa yang seharusnya. Sekolah perlu membantu anak untuk memahami, memperhatikan dan bertindak berdasar nilai-nilai itu di dalam kehidupannya.

Thomas Lickona, "The Return of Character Education, dalam Jurnal Education Leadership, Vol 51 No. 3 November 19973, hlm. 6.

Thomas Lickona²² menyebut bahwa karakter yang baik meliputi tiga bagian yakni:

- "Knowing the good. Untuk membentuk karakter, anak tidak hanya sekedar 1. tahu mengenai hal-hal yang baik, namun mereka harus dapat memahami kenapa perlu melakukan hal tersebut. "Selama ini banyak orang yang tahu bahwa ini baik dan itu buruk, namun mereka tidak tahu alasannya apa dan masih terus melakukan hal-hal yang tidak baik, jadi masih ada gap antara knowing dan acting,"
- 2. "Feeling the good". Konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. Disini anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dia lakukan. "Jika Feeling the good itu sudah tertanam, itu akan menjadi "engine" atau kekuatan luar biasa dari dalam diri seseorang untuk melakukan kebaikan atau mengerem dirinya agar terhindar dari perbuatan negative".
- Yang coba ditumbuhkan adalah "Acting the good". Pada tahap ini, anak 3. dilatih untuk melakukan perbuatan baik. Tanpa melakukan, apa yang sudah diketahui atau dirasakan oleh seseorang, tidak akan ada artinya. Jadi, selama ini di sekolah, anak tidak dilatih untuk melakukan hal-hal yang baik. "Selama ini hanya himbauan-himbauan saja. Sementara, melakukan sesuatu yang baik itu harus dilatih, sehingga hal tersebut akan menjadi bagian dari kehidupan mereka".

Pada intinya bentuk karakter apa pun yang dirumuskan tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai universal. Oleh karena itu, pendidikan yang mengembangkan karakter adalah bentuk pendidikan yang bisa membantu mengembangkan sikap etika, moral dan tanggung jawab, memberikan kasih sayang kepada anak didik dengan menunjukkan dan mengajarkan karakter yang bagus. Hal itu merupakan usaha intensional dan proaktif dari sekolah, masyarakat dan negara.

Reinventing Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa, pendidikan karakter telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan menjadi salah satu langkah menyembuhkan penyakit sosial. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini, secara tidak langsung memunculkan anggapan ketidakpercayaan terhadap peran pendidikan Islam untuk mencegah adanya berbagai penyakit sosial. Dan apakah pendidikan Islam belum dianggap menjadi sumber nilai dalam membentuk karakter bangsa? Pertanyaannya lagi, apakah ada yang salah dalam praktek pendidikan Islam selama

Ibid., hlm. 11

ini. Masuknya ranah pendidikan Islam dalam pemerintahan (publik) seharusnya menciptakan harapan baru bagi umat Islam untuk lebih mewarnai nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain sebagai sarana tafaqquh fi aldin juga sebagai tarbiyatul khuluq bangsa Indonesia. Islam sebagai suatu agama, secara sungguh telah mendorong manusia untuk berusaha melalui pribadi dan kelompoknya agar dapat menciptakan suatu keadaan yang lebih baik, sehingga menjadi sesuatu kekuatan dunia²³.

Kebijakan adanya pendidikan karakter memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi guru-guru pendidikan Islam untuk lebih memutakhirkan pembelajarannya sesuai dengan tuntutan perkembangan. Sebenarnya dalam Pendidikan Islam mempunyai istilah-istilah yang tepat digunakan sebagai pendekatan pembelajaran berkarakter, yaitu: tilâwah, ta'lîm', tarbiyah, ta'dîb, tazkiyah dan tadlrîb. tilâwah menyangkut kemampuan membaca; ta'lim terkait dengan pengembangan kecerdasan intelektual (intellectual quotient); tarbiyah menyangkut kepedulian dan kasih sayang secara naluriah yang didalamnya ada asah, asih dan asuh; ta'dîb terkait dengan pengembangan kecerdasan emosional (emotional quotient); tazkiyah terkait dengan pengembangan kecerdasan spiritual (spiritual quotient); dan tadlrib terkait dengan kecerdasan fisik atau keterampilan (physical quotient atau adversity quotient).

Gambaran mengenai pendidikan karakter di Indonesia sekarang ini setidaknya dapat dilihat dari dua naskah yakni Rencana Induk Pendidikan Karakter Bangsa Terbitan Pemerintah Republik Indonesia (2010) dan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa terbitan Pusat Kurikulum, Kemendiknas (2010). Berdasarkan buku tersebut nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut:

- Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena 1. itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
- Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-2. prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan

Muhammad Marmaduke Picktchall, Kebudayaan Islam, (Surabaya: PT Bungkul Indah, 1993), hlm.7.

budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

3. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.²⁴

Pertanyaannya kemudian adalah, faham apakah yang dianut, relativism moral ataukah absolute moral dalam mengembangkan nilai-nilai di atas?. Sumber nilai-nilai di atas, secara tidak langsung harus disepakati sebagai nilai bersama yang bisa dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia. Masuknya nilainilai di atas (agama, budaya, Pancasila) dalam tujuan pendidikan nasional sebagai sumber pendidikan karakter, masih perlu dinyatakan secara jelas oleh karena sebagai sistem nasional, apapun jenis pendidikan di negara Indonesia, acuan secara yuridis sudah sendirinya adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Maka tidaklah berlebihan kalau pemerintah juga mengontrol terhadap nilai moral yang dikembangkan oleh semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia khusunya pendidikan keagamaan. Argumen yang bisa dikemukakan adalah munculnya sejumlah gerakan militanisme, radikalisme, terorisme yang terus mendera negeri dan semua perilaku yang menunjukkan rendahnya moral yang disebabkan keliru dalam mengambil dan memahami nilai. Akan tetapi juga jangan sampai terjadi indoktirinasi sebuah nilai seperti yang telah terjadi pada Pancasila pada masa Orde Baru.

Mengutif pendapatnya William Kymlika dalam Felix Baghi²⁵ sumber suatu karakter atau jati diri bangsa di manapun umumnya ada tiga yakni asal usul etnis, iman religius dan gagasan mengenai kebaikan bersama. Asal usul etnis dalam hal ini budaya, iman religius dalam hal ini agama dan kebaikan bersama dalam hal ini adalah Pancasila sebagai gagasan sosial politik. Nilai-nilai tersebut diangkat menjadi sumber nilai yang harus dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan nilai-nilai dalam tujuan pendidikan nasional pada hakekatanya adalah nilai-nilai yang diangkat dari ketiga sumber tersebut.

Kemendiknas RI, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta: Balitbang Puskur Kemendiknas RI, 2010), hlm. 14.

Felix Baghi, Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik, (Maumere: Ledarero, 2009), hlm. 261.

Nilai-nilai dalam tujuan pendidikan suatu saat akan berganti jika ada perubahan parundangan, sementara nilai dan tiga sumber sebelumnya relative tetap.

Diangkatnya nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional sebagai sumber pendidikan karakter, menunjukkan diakuinya gagasan mengenai absolute moral dalam arti nilai yang disepakati dan penting. Nilai tersebut baik secara politis maupun yuridis memang telah menjadi kesepakatan bangsa. Namun demikian nilai-nilai Pancasila itu sendiri secara sosiologis belum tentu dijadikan sebagai sumber dari pendidikan karakter bagi sebagian kelompok masyarakat, oleh karena itu pelaku pendidikan karakter dapat saja mengandalkan sumber nilai lain seperti agama dan budaya. Menurutnya Pancasila baik sebagai konsep politik maupun akademis sampai sekarang selalu menghasilkan keragaman pemikiran.

Gagasan yang mirip dengan relativism moral nampak juga dalam kebijakan pendidikan karakter di Indonesia. Hal ini tercermin dari pernyataaan "sekolah dan guru dapat menambah ataupun mengurangi nilai-nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah dan hakekat dari SK/KD dan materi bahasan suatu mata pelajaran"²⁶. Namun demikian perlu dipertanyakan apakah para pelaku pendidikan karakter memiliki kesadaran bahwa pernyataan di atas diartikan untuk bebas saja menentukan nilai-nilai karakter dan itu memang relatif menurut mereka ataukah pernyataan tersebut diartikan untuk bebas saja menentukan nilainilai karakter dan itu memang relatif menurut mereka ataukah pernyataan tersebut dimaksudkan boleh menentukan nilai-nilai karakter baik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana peserta didik belajar. Pernyataan demikian penting untuk diketahui oleh karena gagasan relativism moral berasal dari kemajuan ilmuilmu sosial seperti Antropologi, Etnologi, Sosiologi, dan Sejarah serta kemajuan teknologi informasi yang telah berkontribusi besar dalam mengembangkan pemahaman tentang perbedaan-perbedaan cara berpikir, bersikap berperilaku kelompok bangsa atau masyarakat. Pemahaman seperti ini melahirkan pandangan pluralisme budaya, sikap toleransi terhadap perbedaan nilai bahkan pandangan bahwa moral itu relatif tergantung pada masyarakatnya²⁷.

Keragaman budaya dan masyarakat Indonesia tampaknya diakui dan diadopsi dalam pendidikan karakter Indonesia. Di mana nilai-nilai budaya bangsa dapat dimasukkan sebagai isi pembelajaran. Hal demikian tercermin dalam pernyataan bahwa salah satu sumber nilai dalam pendidikan karakter adalah budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak

Kemendiknas RI, Pengembangan Pendidikan..., hlm. 10.

Sudarminta, Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif, (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, 1997), hlm. 13.

didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu²⁸. Jika nilai-nilai budaya yang dijadikan isi pendidikan karakter di suatu sekolah itu adalah khas, unik, hanya berlaku, di wilayah tersebut bahkan mungkin bertentangan dengan nilai budaya di sekolah lain, maka bisa disebut sebagai nila-nilai partikular yang sifatnya relatif.

Sumber nilai yang lain adalah agama oleh karena diakui secara luas bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama dan ajaran agama menjadi dasar bagi kehidupan²⁹. Bahwa moralitas yang berdasarkan agama telah diakui banyak pihak bahkan ada yang secara apriori menyatakan moralitas harus dan tidak bisa tidak berlandaskan pada ajaran agama. Namun demikian hal ini bisa muncul perdebatan, jika moralitas itu berdasarkan ajaran agama, ajaran agama manakah yang dijadikan sebagai pilihan, sementara agama itu sendiri bermacam-macam berikut dengan ajarannya dan pilihan moralitas yang harus diambil berlaku umum bagi semua tanpa melihat perbedaan agama. Masalah ini mungkin tidak menjadi masalah bagi sekolahsekolah khusus (agama) tetapi bermasalah pada sekolah-sekolah publik. Meskipun nilai moral agama diakui benar dan absolute bagi para pemeluknya tetapi belum tentu diakui benar oleh pemeluk agama lain. Jika hal ini terjadi maka moralitas yang bersumber dari agama menjadi hal yang partikular dan relatif.

Antara ketiga sumber nilai tersebut itu, yakni agama, budaya dan gagasan sosial politik Pancasila, bisa dirasakan bahwa nilai ajaran agamalah yang paling kuat menghujam atau terpatri dalam diri seseorang, oleh karena ajaran agama tidak hanya menjangkau masa kini tetapi mampu memberikan keyakinan akan hari kemudian. Hal ini menjadi kelebihan bagi pendidikan karakter yang berbasis nilai agama. Nilai budaya juga tidak bisa diremehkan oleh karena pasti akan muncul para pendukung budaya tertentu yang berusaha dengan gigihnya memasukkannya sebagai isi pendidikan karakter. Nilai tradisi biasanya dipegang teguh oleh para pewaris kebudayaan. Dua sumber nilai ini meskipun dianggap absolute moral oleh pendukungnya, namun keberlakuannya secara umum dan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia sulit untuk dipaksakan. Secara internal ia bersifat absolute values, secara eksternal ia bersifat relative values.

Nilai-nilai Pancasila menjadi yang paling lemah keberlangsungannya kecuali melalui proses intervensi dengan perangkat hukum dan kebijakan politis lainnya. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa. Bangsa Indonesia sudah ber-Pancasila sebelum Indonesia merdeka yakni Pancasila dalam kebudayaan dan Pancasila dalam religius, setelah itu Pancasila dalam Negara atau dikenal dengan istilah Pancasila dalam tri-prakara³⁰.

Kemendikbud RI, Pengembangan Pendidikan, hlm. 8.

Ibid., hlm. 10.

Notonegoro, Pancasila secara Ilmiah Populer, (Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh, 1980), hlm. 17.

Nilai-nilai Pancasila sekarang ini adalah nilai-nilai Pancasila sebagai gagasan sosial politik bangsa Indonesia dalam bernegara. Dibandingkan dengan dua nilai sebelumnya, nilai Pancasila lebih bersifat konsensus nilai, nilai etik bersama dan menjadi integrasi nilai. Namun nilai Pancasila tidak sekuat nilai agama dan budaya dalam menyakinkan indinvidu akan kebaikan dan kebenarannya. Nilai Pancasila lebih menyakinkan individu akan kebaikan dan kebenarannya. Nilai Pancasila lebih merupakan sebuah identitas yang dikonstruksikan guna membangun keberlangsungan bangsa.

Manakah yang harus diutamakan dari ketiga nilai tersebut dengan kelemahan dan kelebihannya masing-masing? Thomas Lickona menyatakan negara yang mengakui agama, maka pendidikan moralnya diajarkan melalui pendidikan agama dan sekolah agama, sedang negara yang tidak mengakui agama, pendidikan moralnya diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan (civics). Pernyataan ini dapat diartikan bahwa di negara non sekuler nilai moral agama menjadi basis pendidikan karakter, sedangkan di negara-negara sekuler yang umumnya ada di Barat, menggunakan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana bagi pendidikan moral yang sumber nilainya berasal dari gagasan-gagasan sosial politik sekuler, tidak ada kaitannya dengan agama dan hal itu dilakukan di sekolah publik. Paham sekularisme dianggap mampu menyelesaikan konflik hubungan agama dan negara, termasuk dengan memisahkan secara tegas antara sekolah agama dengan sekolah publik.

Berkaitan dengan Indonesia, tidak mungkin bisa dilakukan. Indonesia adalah Negara bukan sekuler dan bukan pula Negara agama. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam dari sisi agama dan kebudayaan. Pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan praktis tidak ada masalah jika nilai-nilai moral agama menjadi dasar dalam pendidikan karakter. Lain halnya pada lembaga pendidikan publik (negeri), nilai-nilai apakah yang sesuai yang akan dikembangkan bisa memunculkan problem tersendiri. Motto "Bhineka Tunggal Ika" menuntun pada bangsa Indonesia mengakui identitas kewarganegaraan yang terbedakan (diferensiated citizenship) dalam agama dan juga budaya. Namun demikian semua warga masyarakat Indonesia harus mendukung identitas kewarganegaraan nasional (national citizenship). Kondisi demikian menjadikan pendidikan karakter harus mampu mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya dan juga nilai Pancasila. Untuk itu kemungkinan terjadinya pertentangan antar berbagai pihak mengenai pilihan nilai bisa saja terjadi. Sejarah panjang bangsa ini telah menunjukkan bahwa Indonesia sering terjadi konflik antara agama dan budaya. Bahkan saat ini masih dijumpai sebagian pemeluk agama dan pewaris budaya tertentu ingin memaksakan suatu nilai untuk diakui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertanyaannya kemudian adalah nilai apa yang seharusnya dikembangkan dalam proses pendidikan sehingga akan menjadi nilai khas bangsa Indonesia dan juga akan melahirkan pendidikan karakter yang otentik bangsa Indonesia?. Terhadap masalah demikian Doni Koesoema menyarankan agar tidak terjadi pertentangan nilai dalam mengadopsi, sebaiknya pendidik menggunakan nilai sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila, ideologi negara Indonesia³¹. Dalam pandangan ini Pancasila diposisikan sebagai materi pendidikan karakter yang paling tepat di antara nilai-nilai yang lain. Hal ini disebabkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan juga mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, sedangkan nilai agama tetap penting dipertahankan, namun tidak dapat dipakai dasar yang kokoh bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Pemahaman demikian bisa dimaklumi oleh karena nilai dalam Pancasila telah diakui sebagai nilai bersama, nilai Pancasila dianggap tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat.

Bagaimana dengan nilai agama dan budaya? Tentunya semua pemeluk agama dan pewaris budaya tertentu tidak akan menerima apabila agama dan budaya mereka dinegasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa nilai agama dan budaya telah ada dan hidup dalam keyakinan masyarakat Indonesia jauh sebelum Pancasila diletekkan sebagai dasar negara. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama justru semakin berkembang pesat seiring semakin meluasnya dekadensi moral para remaja Indonesia. Orang tua sekarang cenderung menyekolahkan anak-anaknya pada lembaga pendidikan agama dengan harapan anaknya akan terbentengi moralnya dari pengaruh negatif dampak globalisasi. Walaupun sebenarnya konsep pendidikan karakter Indonesia telah menempatkan nilai agama dan budaya di samping nilai Pancasila sebagai sumbernya. Bagi sebagian pendukung agama dan budaya tertentu akan mengatakan bahwa nilai moral Pancasila sendiri masih dianggap sebagai nilai yang absurd dan multi tafsir. Masih dipertanyakan apakah memang nilai moral Pancasila itu bisa diamalkan. Jika ada, apakah ada metode belajar menurut Pancasila, cara makan menurut Pancasila, dan sebagainya.

Kembali pada permasalahan awal perihal nilai yang dijadikan isi pendidikan karakter apakah dipahami sesuatu yang absolut atau relatif. Kalau dicermati dalam buku pedoman pendidikan karakter (kemendikbud 2010) tampaknya konsep pendidikan karakter Indonesia cenderung menempatkan nilai sebagai hal yang absolut, penting, dan perlu diberikan kepada peserta didik. Bagi bangsa Indonesia yang lebih memandang dirinya sebagai masyarakat komunal, nilai memang dipahami sebagai kekuatan spiritual dan emosional yang urgen yang mampu menggerakkan kehidupan ini. Nilai bukan semata-mata gejala alamiah, relatif maupun subyektif. Dalam masyarakat komunitarian sebuah kelompok bangsa

Doni Koesoema, Pendidikan Karakter..., hlm. 207.

berhak menentukan nilai-nilai apa yang layak dan sebaiknya diberikan kepada individu anggota komunitas tersebut. Menurut Will Kymlicka sebuah masyarakat komunitarian dapat dan seharusnya mendorong orang untuk menerima konsepsikonsepsi tentang kehidupan yang baik yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakatnya³². Masyarakat Indonesia bisa menerima adanya pandangan hidup bersama sebagai sebuah konsep mendasar tentang tentang kehidupan yang baik dalam hal ini Pancasila. Sementara itu pula masyarakat Indonesia bisa menerima pandangan hidup tiap komunitas yang berbeda, dalam hal ini agama dan budaya. Menurut penulis, gejala ini bukanlah reletivism moral tetapi lebih merupakan pengakuan terhadap adanya pluralitas termasuk pluralitas moral.

Sementara, pluralisme di Indonesia merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Format pluralitas yang menguat lewat proses sejarah dengan berbagai dimensinya dipahami mempunyai keunikan jika dibanding dengan pluralitas di negara-negara lain. Atas dasar pluralitas itu, maka Indonesia tidak mengambil bentuk negara agama dan juga tidak mengambil bentuk negara sekuler. Indonesia membentuk negara sendiri sebagai negara Pancasila di mana negara tidak identik dengan agama tertentu tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara. Bagaimana negara terhadap agama bisa dilihat dalam UUD 1945 baik pada pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya. Sila pertama Pancasila dan bab XI UUD 1945 yang berjudul agama merupakan landasan konstitusinya. Penjelasan UUD 1945 menegaskan: Oleh karena Undangundang harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.³³

Persoalannya sekarang adalah bagaimana memunculkan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa inti pendidikan Islam adalah adalah *tarbiyatul khuluk*, sehingga sebenarnya pelaksanaan pendidikan Islam sejak lahirnya Islam sampai sekarang seharusnya dalam rangka memperbaiki dan membentuk akhlak yang sesuai dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dalam kerangka teologis-filosofis bukan hanya berhenti pada metafisis-filofis. Realitas Maka, upaya untuk mengkaji kembali pelaksanaan pembelajaran PAI semakin mendesak apabila dikaitkan dengan kenyataan di lapangan yakni, seperti krisis akhlak yang ditandai banyaknya kejahatan, perkelahian antar pelajar, perilaku seks bebas dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Will Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, terj. Agus Wahyudi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 276.

Penjelasan UUD 1945, Bag. Umum, angka II. (4)

Berdasarkan hal-hal di atas tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh pendidik muslim kecuali memutakhirkan pembelajarannya dengan memasukkan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari ajaran Islam dalam kurikulum. Salah satu bentuk pemutakhiran pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter Islam dalam semua materi pendidikan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran metafisis-filosofis tetapi harus sudah pada body of knowledge yang dapat memberi gambaran yang utuh tentang nilai-nilai Islam dalam materi-materi pendidikan.

Simpulan

Pendidikan karakter merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Nilai ideal yang dikembangkan dalam pendidikan karakter Indonesia mencakup nilai-nilai agama, budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari ketiga sumber tersebut berhasil diidentifikasi sejumlah nilai yang dianggap layak untuk dikembangkan dalam pendidikan karakter kepada peserta didik melalui proses intervensi dan habituasi yakni nilai kabajikan religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, patriotisme, cinta damai, peduli lingkungan sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter di Indonesia lebih mencerminkan paham obsulote moral dari pada relativism moral. Paham absolute moral ini dapat dilihat pada diangkatnya nilai-nilai Pancasila sebagai sumber pendidikan karakter, sehingga nilai dalam Pancasila baik secara politis dan yuridis telah menjadi kesepakatan bersama. Adapun dua sumber nilai yang lain yakni agama dan budaya lebih berlaku paham pluralitas moral (bukan relativism moral), di mana pendidik dan praktisi pendidikan dapat mengurangi atau menambah nilai-nilai yang sejalan dengan masyarakat. Pendidikan karakter yang seperti di atas itulah yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang otentik atau khas pendidikan karakter Indonesia.

Rujukan

- Bulach, Cletus R., "Implementing a Character Education Curriculum and Assessing Its Impact on Student Behavior", ProQuest Education Journal, (Dec. 2002), 80, http://- www.jstor.org/pss/30189797, [22 Juni 2011].
- Baghi, Felix, Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik, Maumere: Ledarero, 2009.
- Kemendiknas RI, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Jakarta: Balitbang Puskur Kemendiknas RI, 2010.
- Koesoema, A. Doni, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak, di Zaman Global, Jakarta: Grasindo, 2010.

- Koesoema, Doni, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak Bangsa, di Zaman Global, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Kymlicka, Will, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, terj. Agus Wahyudi, Yoagyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Laporan Badan Nasional Penanggulangan Narkotika tahun 2008
- Lasmawan, Wayan, "Merekonstruksi Mata Pelajaran Berdasarkan Paradigma Teknohumanistik", Makalah, pada Seminar Pendidikan yang di FIS Undiksa, 30 Oktober, 2009.
- Lewis, Kirsten, "Character Education Manifesto", News, Boston University, 1996.
- Lickona, Thomas, "Talks About Character Education", wawancara oleh Early Chilhood Today, Pro Quest Education Journal, April, 2000, http://webcache. google usercontent. com., [20 April 2010].
- Lickona, Thomas, "The Return of Character Education, dalam Jurnal Education Leadership, Vol 51 No. 3 November 1973
- Lickona, Thomas, Education for Character Education: How Our School Can Teach Respect and Responsibility, New York: Bantam, 1991.
- Megawangi, Ratna, Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa, Jakarta: IHF dan BP Migas, 2004.
- Mounier, Emmanuel, The Character of Man, New York: Harper dan Brathers,
- Notonegoro, Pancasila secara Ilmiah Populer, Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh, 1980.
- Nuh, Muhammad, "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" dalam Kompas edisi Sabtu, 20 Februari 2010.
- Penejelasan UUD 1945, Bag. Umum, angka II. (4)
- Picktchall, Muhammad Marmaduke, Kebudayaab Islam, Surabaya: PT Bungkul Indah, 1993.
- Samsuri, "Mengapa Perlu Pendidikan Karakter". *Makalah*, disajikan pada workshop tentang Pendidikan Karakter oleh FISE UNY, Yogyakarta tahun 2009.
- Simuh, Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999.

Situs resmi BKKBN tahun 2008

Sudarminta, Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif, Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, 1997.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 7

Zuchdi, Darmiyati, Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Zuriah, Nurul, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.